

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbedaan utama antara negara maju dan negara berkembang dapat dilihat dari bagaimana aset-aset yang dimiliki dimanfaatkan. Menurut Sri Mulyani (2024), di negara maju, aset dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan pendapatan, sehingga masyarakatnya dapat bekerja dengan lebih santai. Sebaliknya, di negara berkembang, masyarakat cenderung bekerja keras, namun aset yang dimiliki sering kali kurang dimanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023, pendapatan pajak terbesar berasal dari pajak penghasilan yang menyumbang sekitar Rp1.000 triliun atau 50% dari total penerimaan pajak, sedangkan penerimaan dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) hanya sekitar Rp500 miliar atau 0,0002%. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang karena penerimaan pajak utama berasal dari pajak penghasilan, bukan dari pengelolaan aset negara.

Pemerintah Republik Indonesia belum optimal dalam mengelola BMN. Neraca LKPP Audited 2023 mencatat nilai aset tetap pemerintah sebesar Rp7.000 triliun, namun penerimaan kas negara dari pengelolaan BMN hanya sebesar Rp549 miliar atau 0,008% dari total aset tetap tersebut. Jika dibandingkan dengan suku bunga deposito di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 3% (Bank Indonesia, 2023), pendapatan dari pengelolaan BMN masih sangat kecil.

Pengelolaan BMN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 27/2014). Pengelolaan

ini mencakup kegiatan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan penghapusan BMN. Untuk mendukung pengelolaan tersebut, pemerintah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang diluncurkan pada tahun 2016. Aplikasi ini dirancang untuk menjalankan siklus pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Namun, implementasi SIMAN versi lama belum maksimal karena sistemnya belum terintegrasi, masih mengandalkan proses manual dalam penetapan surat dan surat keputusan (Mulyadi et al., 2020).

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi tata kelola pemerintahan, khususnya melalui digitalisasi layanan yang meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik (Natika, 2024). Pemerintah Republik Indonesia mendukung transformasi ini dengan menerbitkan sejumlah regulasi, antara lain Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Industri 4.0, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dan Nomor 184/PMK.06/2022 tentang Pengelolaan BMN secara elektronik menggunakan aplikasi SIMAN.

Fenomena digitalisasi pengelolaan BMN tidak hanya terjadi pada SIMAN versi lama, melainkan juga pada pengembangan SIMAN Versi 2 yang diluncurkan oleh Kementerian Keuangan sebagai respons terhadap keterbatasan sistem sebelumnya. Transformasi digital ini menjadi bagian dari upaya peningkatan tata kelola keuangan dan aset negara yang lebih transparan dan efisien, sesuai dengan

regulasi yang telah disebutkan sebelumnya (Kemenkeu, 2024). Dalam tiga tahun terakhir, Kementerian Keuangan meluncurkan beberapa aplikasi pendukung seperti Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah (SAKTI), SIMAN Versi 2, dan aplikasi pajak CORE-TAX. Ketiga aplikasi ini saling terintegrasi guna menciptakan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.

CORE-TAX digunakan untuk pengelolaan pajak, dimana hasil pajak kemudian dikelola sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seluruh proses penganggaran, pencairan, dan pencatatan APBN dilakukan menggunakan aplikasi SAKTI. Dari total APBN senilai Rp1.000 triliun pada 2023, sekitar 30% atau Rp300 triliun direalisasikan sebagai belanja modal, yang selanjutnya menjadi aset tetap yang dikelola melalui SIMAN (LKPP, 2023). Nilai aset tetap pemerintah pusat yang mencapai Rp13.000 triliun menegaskan pentingnya pengelolaan BMN menggunakan SIMAN sebagai bagian krusial dalam tata kelola pemerintahan (Kemenkeu, 2024). Oleh karena itu, diperlukan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaannya untuk menjaga akuntabilitas negara.

Pemerintah meluncurkan SIMAN Versi 2 untuk mengatasi berbagai kendala pada versi lama, seperti kurangnya integrasi data, lambatnya proses pengolahan informasi, dan keterbatasan transparansi. SIMAN V2 dirancang untuk memberikan data secara *real-time*, meningkatkan kemudahan akses, serta mendukung efisiensi dan transparansi pengelolaan BMN melalui digitalisasi proses bisnis. Sistem ini juga terintegrasi dengan aplikasi lain seperti SAKTI untuk memastikan validitas data aset secara menyeluruh (Yasmin, 2024).

Transformasi SIMAN dari versi lama ke SIMAN Versi 2 merupakan bagian dari perubahan mendasar yang tidak hanya meliputi teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir, dari sekadar pencatatan aset menjadi manajemen aset yang lebih strategis (Witang et al., 2021). Perubahan ini mencakup peningkatan antarmuka sistem, penyatuan siklus pengelolaan BMN, serta peningkatan transparansi yang memungkinkan seluruh pimpinan kantor untuk mengawasi proses pengelolaan aset secara langsung.

Implementasi SIMAN Versi 2 di Politeknik Pelayaran Surabaya menghadirkan berbagai tantangan bagi para pegawai sebagai pengguna utama sistem. Adaptasi terhadap perubahan sistem yang lebih kompleks dan terintegrasi memerlukan pemahaman mendalam serta kesiapan mental dan teknis. Menurut Purnama et al. (2021), pengenalan teknologi baru di instansi publik sering kali menemui hambatan berupa perlawanan dari pegawai yang terbiasa menggunakan sistem lama, yang dapat disebabkan oleh ketidakpahaman terhadap fitur baru dan perubahan alur kerja. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pegawai merespons perubahan ini dan strategi adaptasi yang mereka terapkan guna memastikan keberhasilan penerapan SIMAN Versi 2.

Proses transisi ke SIMAN Versi 2 di Politeknik Pelayaran Surabaya menunjukkan bahwa tidak semua pegawai mampu menerima perubahan dengan mudah. Fitriani et al. (2021) menyatakan bahwa tingkat penerimaan teknologi berbeda-beda di antara individu dalam organisasi, sehingga proses adaptasi memerlukan pelatihan intensif dan komunikasi yang efektif untuk meminimalisir hambatan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan adaptasi serta hambatan yang dialami pegawai selama proses perubahan.

Dalam praktiknya, beberapa kendala yang muncul antara lain keterlambatan pengajuan pengelolaan aset dan penghapusan BMN akibat ketidaklengkapan dokumen dan perbedaan proses persuratan yang sebelumnya manual menjadi tersistem melalui SIMAN Versi 2. Salah satu operator SIMAN menyatakan bahwa perubahan mendasar pada aspek permohonan pengelolaan aset menuntut pemahaman ulang yang cukup tinggi, termasuk proses autentikasi menggunakan perangkat mobile yang baru diterapkan. Hal ini memperlihatkan bahwa perubahan sistem tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memerlukan adaptasi budaya kerja yang signifikan.



Gambar 1.1 Siklus Pengelolaan BMN

Sebagai landasan hukum dalam pengelolaan BMN dan pengembangan SIMAN, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 menggantikan PP Nomor 27 Tahun 2014, memperkuat regulasi mengenai penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN. Peraturan ini juga menambahkan pengaturan mengenai kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur serta memperluas subjek pengelola BMN, termasuk keterlibatan desa dalam proses tukar menukar dan hibah BMN (PP No. 28/2020). Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.06/2022 secara spesifik mengatur pengelolaan BMN secara elektronik melalui aplikasi SIMAN versi 2 sebagai bagian dari Sistem Inti Administrasi Perpajakan, yang bertujuan meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan aset negara.

Fenomena transformasi digital ini merupakan refleksi nyata dari upaya pemerintah dalam meningkatkan tata kelola BMN yang sebelumnya terhambat oleh keterbatasan sistem manual dan kurangnya integrasi data. SIMAN Versi 2 tidak hanya menjadi alat teknologi, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan budaya kerja di instansi pemerintah, khususnya dalam pengelolaan aset. Melalui pengintegrasian dengan aplikasi lain seperti SAKTI dan CORE-TAX, SIMAN V2 membangun ekosistem pengelolaan keuangan dan aset yang lebih kohesif dan responsif terhadap kebutuhan pengelolaan negara modern (Kemenkeu, 2024).

Penerapan SIMAN Versi 2 di Politeknik Pelayaran Surabaya, sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Perhubungan, menjadi fenomena penting untuk mengkaji bagaimana transformasi digital ini berdampak pada pengelolaan aset dan dinamika organisasi. Politeknik ini memiliki indeks

Good governance yang tinggi, namun menghadapi tantangan adaptasi pegawai terhadap sistem yang lebih kompleks dan terintegrasi (Kementerian Perhubungan, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, melainkan juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan manajemen perubahan.

Transformasi digital dalam pengelolaan aset di institusi publik, seperti yang diwujudkan melalui penerapan SIMAN Versi 2, membawa dampak signifikan terhadap peningkatan efisiensi pengelolaan aset negara. Digitalisasi mengubah proses yang sebelumnya manual dan terpisah-pisah menjadi sistem yang terintegrasi dan otomatis, memungkinkan pengelolaan aset yang lebih akurat, cepat, dan transparan. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan kinerja operasional tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan tata kelola yang baik sesuai prinsip *good governance*.

Salah satu dampak utama dari transformasi digital adalah peningkatan akurasi data aset. Dengan penggunaan SIMAN Versi 2, data aset dapat diperbarui secara *real-time* dan terintegrasi dengan sistem lain seperti SAKTI, sehingga mengurangi kesalahan pencatatan dan duplikasi data. Hal ini sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dan optimalisasi pemanfaatan aset. Selain itu,



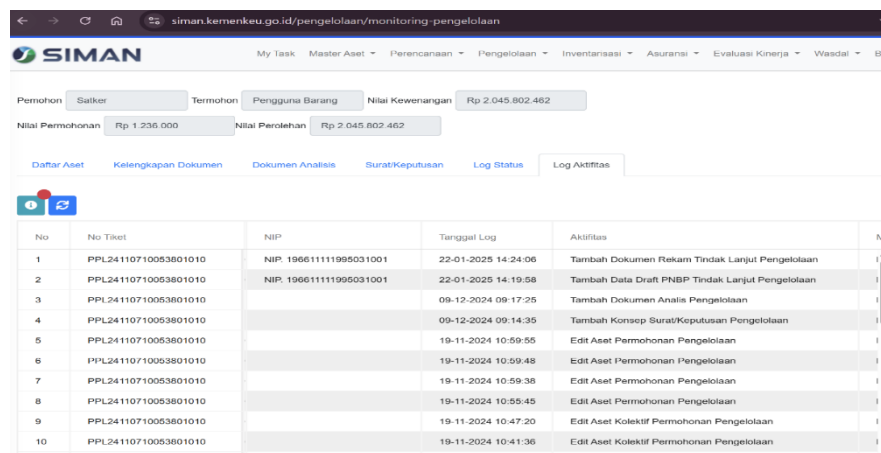
Gambar 1.2. Tampilan SIMAN



Gambar 1. 3. Tampilan SIMAN Versi 2

digitalisasi mempercepat proses administrasi pengelolaan aset, seperti pengajuan, persetujuan, dan pelaporan, yang sebelumnya memerlukan waktu lebih lama dan rentan kesalahan manusia.

Efisiensi juga terlihat dari peningkatan transparansi dan kemudahan pengawasan oleh berbagai pemangku kepentingan. SIMAN Versi 2 menyediakan akses yang lebih terbuka bagi pimpinan dan auditor untuk memonitor status dan penggunaan aset secara langsung, sehingga mendorong akuntabilitas dan pengelolaan yang lebih bertanggung jawab.



No	No Tiket	NIP	Tanggal Log	Aktivitas
1	PPL24110710053801010	NIP. 196611111995031001	22-01-2025 14:24:06	Tambah Dokumen Rekam Tindak Lanjut Pengelolaan
2	PPL24110710053801010	NIP. 196611111995031001	22-01-2025 14:19:58	Tambah Data Draft PNBK Tindak Lanjut Pengelolaan
3	PPL24110710053801010		09-12-2024 09:17:25	Tambah Dokumen Analisis Pengelolaan
4	PPL24110710053801010		09-12-2024 09:14:35	Tambah Konsep Surat/Keputusan Pengelolaan
5	PPL24110710053801010		19-11-2024 10:59:55	Edit Aset Permohonan Pengelolaan
6	PPL24110710053801010		19-11-2024 10:59:48	Edit Aset Permohonan Pengelolaan
7	PPL24110710053801010		19-11-2024 10:59:38	Edit Aset Permohonan Pengelolaan
8	PPL24110710053801010		19-11-2024 10:55:45	Edit Aset Permohonan Pengelolaan
9	PPL24110710053801010		19-11-2024 10:47:20	Edit Aset Kolektif Permohonan Pengelolaan
10	PPL24110710053801010		19-11-2024 10:41:36	Edit Aset Kolektif Permohonan Pengelolaan

Gambar 1.4. Monitoring Pengelolaan BMN

Implementasi SIMAN Versi 2 di Politeknik Pelayaran Surabaya harus dipandang sebagai bagian dari transformasi digital yang lebih luas untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan aset negara. Keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan strategi adaptasi yang diterapkan oleh organisasi.

Penelitian ini berlandaskan pada Teori Perubahan Organisasi dan prinsip *Good governance* sebagai landasan utama untuk memahami dampak transformasi digital pengelolaan aset melalui SIMAN Versi 2. Teori Perubahan Organisasi

menjelaskan bahwa adaptasi terhadap perubahan sistem informasi tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga perubahan budaya, struktur, dan pola pikir organisasi (Kotter, 2021). Keberhasilan transformasi bergantung pada manajemen perlawanan terhadap perubahan dan kesiapan pegawai dalam menerima inovasi baru.

Prinsip *Good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi menjadi tolok ukur efektivitas pengelolaan BMN. Transparansi memastikan informasi pengelolaan aset dapat diakses dan dipertanggungjawabkan, akuntabilitas memastikan pertanggungjawaban pengelolaan kepada pemangku kepentingan, dan partisipasi memastikan keterlibatan seluruh elemen organisasi dalam proses pengelolaan aset (Kettunen et al., 2020). Kedua teori ini secara sinergis membantu menganalisis bagaimana SIMAN Versi 2 mempengaruhi tata kelola aset di Politeknik Pelayaran Surabaya.

Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif fenomenologi untuk menggali pengalaman subjektif pegawai dalam menghadapi transformasi SIMAN Versi 2. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengguna utama sistem, observasi langsung selama proses penggunaan, dan dokumentasi terkait pelatihan dan implementasi sistem baru. Analisis data menggunakan model Stevick-Colaizzi-Keen yang efektif untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari pengalaman pegawai (Hamzah & Amir, 2020).

Pemilihan informan secara purposif memastikan fokus pada pengguna yang memiliki pengalaman langsung dan pemahaman mendalam tentang penggunaan SIMAN Versi 2, sehingga hasil penelitian dapat memberikan

gambaran komprehensif mengenai tantangan dan strategi adaptasi dalam konteks institusi publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan makna bahwa transformasi digital melalui penerapan SIMAN Versi 2 membawa perubahan signifikan dalam efisiensi dan tata kelola aset negara di Politeknik Pelayaran Surabaya. Keberhasilan transformasi sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan strategi adaptasi yang efektif. Dengan dukungan pelatihan dan komunikasi yang memadai, digitalisasi pengelolaan BMN menggunakan SIMAN Versi 2 ini dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, sejalan dengan prinsip *good governance*.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memahami hubungan antara transformasi digital dan manajemen perubahan organisasi di sektor publik, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pengambil kebijakan dan pelaksana di institusi serupa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana menemukan makna transformasi digital atas perubahan SIMAN 1 ke SIMAN 2 bagi *stakeholder* Politeknik Pelayaran Surabaya?
2. Bagaimana perubahan sistem manajemen aset berdampak pada tata kelola (*good governance*) terutama akuntabilitas dan transparansi di Politeknik Pelayaran Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan makna transformasi digital atas perubahan SIMAN 1 ke SIMAN 2 bagi *stakeholder* Politeknik Pelayaran Surabaya serta dampak tata kelola (*good governance*) terutama akuntabilitas dan transparansi

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis (Teoritis)

Manfaat akademis yang dapat diberikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Memberikan kontribusi yang positif dengan memperkuat dan mendukung konsep Teori Perubahan Organisasi (*Theories of Organizational Change*.) dan Teori Tata Kelola yang Baik (*Good governance*).
2. Memberikan masukan dan pengembangan ilmu pengetahuan Akuntansi khususnya dibidang akuntansi sektor publik yang berkaitan langsung dengan perubahan sistem manajemen aset di pemerintahan.
3. Memberikan tambahan referensi atau literatur yang dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam memahami pengelolaan barang milik negara dan SIMAN Versi 2 sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diberikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Memberikan rekomendasi guna meningkatkan implementasi SIMAN versi 2 di Politeknik Pelayaran Surabaya.

2. Membantu pimpinan dan manajemen perguruan tinggi Politeknik Pelayaran Surabaya dalam membuat kebijakan dan prosedur penggunaan aplikasi SIMAN Versi 2 yang efektif dan memastikan penerapannya sejalan dengan aturan dan kebijakan yang berlaku.
3. Membantu institusi perguruan tinggi Politeknik Pelayaran Surabaya untuk mendukung peningkatan pengelolaan BMN yang baik serta membantu meningkatkan kepercayaan dalam memenuhi harapan para pemangku kepentingan.